Global Insight Journal

Vol 08, No. 01
Oktober - Maret 2023
ISSN 2541-318X

Peran Kebudayaan Nasional Dalam Membentuk Kebijakan Luar Negeri: Studi Komparatif Pengaruh Kelompok Ideologis, Dinamika Sosial Dan Budaya Di Swedia Dan Indonesia Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Luar Negeri

Agung Y. Nugroho
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
aijn_agung@yahoo.com

Abstract

This research explores how culture, social behavior, and ideology shape the foreign policies of the two countries and examines their impact on the promotion and protection of human rights in the international dynamics of each country. The theoretical framework emphasizes the importance of national culture in foreign policy formulation and its interaction with human rights considerations. Adopting a comparative approach, this study aims to identify similarities and differences between Sweden and Indonesia in terms of how cultural factors influence foreign policy decisions related to human rights. This case study provides a deeper understanding of the factors driving foreign policy choices and how national culture interacts with human rights considerations in shaping those decisions. The implications of this research highlight the importance of understanding the role of national culture in shaping foreign policy and its influence on human rights issues. Overall, this research contributes to the field of international relations by providing valuable insights into the intersections of national culture, human rights, and foreign policy, thereby fostering a deeper understanding of the complexities involved in addressing global challenges in culturally diverse contexts.

Keywords: *cultural, religious, and ideological groups; foreign policy; human rights; Sweden; Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana budaya, perilaku sosial, dan ideologis membentuk kebijakan luar negeri kedua negara dan mengkaji dampaknya terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam dinamika internasional masing-masing negara. Kerangka teoritis menekankan pentingnya budaya nasional dalam perumusan kebijakan luar negeri dan interaksinya dengan pertimbangan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara Swedia dan Indonesia dalam hal bagaimana faktor budaya mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri terkait dengan hak asasi manusia. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong pilihan kebijakan luar negeri dan bagaimana

budaya nasional berinteraksi dengan pertimbangan hak asasi manusia dalam membentuk keputusan tersebut. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya memahami peran budaya nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri dan pengaruhnya terhadap isu-isu hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada bidang hubungan internasional dengan memberikan wawasan yang berharga kepada persimpangan budaya nasional, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri, sehingga mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang terlibat dalam mengatasi tantangan global dalam konteks keragaman budaya.

Kata kunci: *kelompok budaya, agama, dan ideologi, kebijakan luar negeri, hak asasi manusia, Swedia, Indonesia*

Pendahuluan

Keputusan kebijakan luar negeri dibentuk oleh banyak faktor, termasuk kepentingan nasional, pertimbangan geopolitik, dan aliansi strategis. Namun, penentu yang sering diabaikan tetapi berpengaruh adalah budaya nasional suatu negara (Jonsson, 2017). Budaya nasional mencakup kepercayaan, nilai, norma, dan tradisi bersama yang mendefinisikan masyarakat, dan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran budaya nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri, dengan fokus pada pengaruh kelompok budaya, agama, dan ideologi di Swedia dan Indonesia. Kedua negara ini memberikan studi kasus komparatif yang menarik karena perbedaan latar belakang budaya, konteks sejarah, dan pendekatan mereka terhadap isu-isu hak asasi manusia.

Dengan menganalisis interaksi antara budaya nasional, hak asasi manusia, dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, penelitian ini berusaha untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana faktor budaya mempengaruhi keterlibatan suatu negara dengan masalah hak asasi manusia dalam hubungan internasional. Swedia, yang terkenal dengan komitmennya yang kuat terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai egaliter, menawarkan kasus yang menarik untuk mengeksplorasi bagaimana kelompok budaya berkontribusi pada keputusan kebijakan luar negeri negara yang terkait dengan hak asasi manusia.

Dengan sejarah memperjuangkan hak asasi manusia, Swedia secara aktif mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam agenda kebijakan luar negerinya (Lindberg, 2010). Memahami peran kelompok budaya, agama, dan ideologis dalam

membentuk kebijakan luar negeri Swedia akan menjelaskan mekanisme di mana budaya nasional memengaruhi pilihan kebijakan dalam konteks ini.

Di sisi lain, Indonesia dengan lanskap budaya, agama, dan ideologinya yang beragam, menghadirkan kasus yang kontras. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mendamaikan keragaman budayanya dengan keputusan kebijakan luar negerinya terkait hak asasi manusia (Taqi, et .al., 2016). Meneliti pengaruh kelompok budaya, agama, dan ideologi dalam kebijakan luar negeri Indonesia akan memberikan wawasan tentang kompleksitas dan ketegangan yang muncul ketika kelompok budaya yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda tentang hak asasi manusia dan implikasinya terhadap hubungan internasional.

Dengan menggali latar belakang sejarah, norma budaya, nilai-nilai agama, dan orientasi ideologi masing-masing negara, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang berkontribusi terhadap variasi pilihan kebijakan luar negeri Swedia dan Indonesia. Dengan menyoroti peran budaya nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas yang melekat dalam mengatasi tantangan global dalam konteks budaya yang beragam. Komparasi ini akan memberikan wawasan berharga dan rekomendasi kebijakan bagi Swedia dan Indonesia untuk mendorong integrasi yang lebih besar dari masalah hak asasi manusia dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mereka, berkontribusi pada kemajuan perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama global.

Kerangka Teoritis

Peran budaya nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Kerangka teoretis ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana kelompok budaya, agama, dan ideologis memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks hak asasi manusia, di Swedia dan Indonesia.
Konsep Budaya Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, Budaya nasional mencakup kepercayaan, nilai, norma, tradisi, dan identitas kolektif bersama dari suatu masyarakat (Paus, 2017). Hal ini membentuk cara suatu negara memandang dirinya sendiri dan hubungannya dengan negara lain. Dalam konteks kebijakan luar negeri, budaya nasional mempengaruhi prioritas, tujuan, dan strategi suatu negara dalam hubungan internasional (Paus, 2017).

Kelompok budaya, agama, dan ideologi dalam masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri. Kelompok-kelompok ini mewakili perspektif, nilai, dan kepentingan berbeda yang memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Kelompok budaya mencakup tradisi budaya, bahasa, seni, dan warisan bersama, sementara kelompok agama membawa keyakinan agama, etika, dan kerangka moral ke dalam wacana kebijakan luar negeri (Jonsson,2017). Kelompok ideologis, seperti partai politik, organisasi advokasi, dan gerakan sosial, mengadvokasi posisi kebijakan tertentu berdasarkan orientasi ideologis mereka (Jonsson,2017).

Konsep berikutnya adalah Interaksi antara Budaya Nasional dan Hak Asasi Manusia. Pertimbangan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri kontemporer. Budaya nasional memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan suatu negara terhadap isu-isu hak asasi manusia. Nilai-nilai budaya, keyakinan agama, dan orientasi ideologi sering mempengaruhi interpretasi dan prioritas hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Pettersson, 2010). Memahami interaksi ini sangat penting untuk memahami bagaimana negara menangani masalah hak asasi manusia dalam keterlibatan internasional mereka.

Implimentasi dari konsep diatas di kombinasikan dengan teori utama yaitu Analisis Komparatif. Dimana pendekatan analisis komparatif memungkinkan pemahaman yang bernuansa tentang pengaruh budaya nasional terhadap keputusan kebijakan luar negeri di Swedia dan Indonesia (Rughiniș, 2015). Dengan membandingkan kedua negara ini, yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan ideologi yang berbeda, menjadi mungkin untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam cara faktor budaya membentuk kebijakan luar negeri, khususnya mengenai hak asasi manusia. Hal tersebut kemudian diterapkan dalam pemahaman pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dimana proses keputusan ini melibatkan berbagai aktor, lembaga, dan kepentingan. Budaya nasional, sebagaimana diwujudkan oleh kelompok budaya, agama, dan ideologis, berkontribusi pada perumusan dan implementasi keputusan kebijakan luar negeri (Jonsson,2017). Memahami dinamika proses pengambilan keputusan dan pengaruh faktor budaya sangat penting untuk memahami bagaimana budaya nasional membentuk hasil kebijakan luar negeri.

Konsep berikutnya adalah Hak Asasi Manusia. Pertimbangan hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri di banyak negara. Penggabungan hak asasi manusia ke dalam keputusan kebijakan luar negeri bervariasi antar negara dan dipengaruhi oleh

faktor budaya, agama, dan ideologis (Pettersson, 2010). Menjelajahi bagaimana Swedia dan Indonesia menangani masalah hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri mereka memberikan wawasan tentang beragam pendekatan dan tantangan yang muncul di persimpangan budaya nasional dan hak asasi manusia (Rughiniș, 2015). Kerangka teoritis yang diuraikan di atas akan memandu analisis peran budaya nasional, kelompok budaya, agama, dan ideologis, serta pengaruhnya terhadap keputusan kebijakan luar negeri yang terkait dengan hak asasi manusia di Swedia dan Indonesia.

Pembahasan dan Analisa

1. Peran kelompok ideologis dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri di Swedia dan Indonesia dalam kontek hak asasi manusia

Kelompok ideologi memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri Swedia dan Indonesia mengenai hak asasi manusia. Kelompok-kelompok ini mewakili ideologi politik tertentu dan sering mengadvokasi posisi kebijakan tertentu pada isu-isu hak asasi manusia (Rughiniș, 2015). Memahami pengaruh kelompok ideologi sangat penting untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan luar negeri dibuat, dan bagaimana pertimbangan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam keputusan tersebut.

Swedia dan Indonesia memiliki lanskap ideologis berbeda yang memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri mereka. Swedia ditandai dengan tradisi demokrasi sosial, menekankan kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, dan komitmen untuk kerjasama internasional (Eriksson, 2005). Di sisi lain, Indonesia telah mengalami berbagai pengaruh ideologis, termasuk nasionalisme, pan-Islamisme, dan pluralisme, yang berkontribusi pada pertimbangan kebijakan luar negerinya (Jusuf,2011).

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia sebagai Prioritas Ideologis, di Swedia hak asasi manusia sering dianggap sebagai prioritas ideologis yang fundamental (Lindberg, 2010). Tradisi sosial demokrasi negara ini sangat menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kelompok ideologi di Swedia, seperti demokrat sosial dan aktivis hak asasi manusia, secara aktif mengadvokasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia baik di dalam negeri maupun dalam keputusan kebijakan luar negeri (Lindberg, 2010). Di Indonesia, HAM mungkin tidak selalu menjadi fokus ideologis utama. Nasionalisme, pertimbangan agama, dan faktor ideologis lainnya terkadang dapat lebih diutamakan

daripada masalah hak asasi manusia dalam keputusan kebijakan luar negeri (Taqi, et .al., 2016). Namun, ada kelompok ideologis di Indonesia yang mengadvokasi hak asasi manusia dan berusaha untuk membentuk kebijakan luar negeri negara tersebut (Jusuf,2011).

Kelompok ideologis di kedua negara memainkan peran penting dalam advokasi hak asasi manusia dan perumusan kebijakan. Di Swedia, kelompok ideologi yang berfokus pada hak asasi manusia bekerja sama dengan pemerintah untuk memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri (Fredrik, 2014). Mereka terlibat dalam upaya diplomatik, kampanye kesadaran publik, dan melobi untuk mempromosikan pertimbangan hak asasi manusia dalam hubungan internasional (Fredrik, 2014). Di Indonesia, kelompok ideologi tertentu mungkin berfokus pada isu HAM tertentu yang sejalan dengan ideologi mereka yang lebih luas (Reksodiputro, 2017). Misalnya, aktivis hak asasi manusia dalam organisasi Islam mengadvokasi kebebasan beragama dan hak-hak minoritas agama, sementara kelompok nasionalis dapat memprioritaskan isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan dan penentuan nasib sendiri (Reksodiputro, 2017).

Tantangan di kedua negara terletak pada keseimbangan antara nilai-nilai ideologis dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Di Swedia, mungkin ada perdebatan dalam kelompok ideologis tentang sejauh mana intervensi dalam urusan negara lain atas nama mempromosikan hak asasi manusia. Menyeimbangkan pengejaran hak asasi manusia dengan penghormatan terhadap kedaulatan dan non-interferensi bisa jadi rumit. Di Indonesia, tantangannya adalah mendamaikan nilai-nilai ideologis dengan universalitas hak asasi manusia. Beberapa kelompok ideologis mungkin memprioritaskan kepentingan nasional atau norma budaya di atas prinsip hak asasi manusia tertentu, menciptakan ketegangan antara prioritas domestik dan kewajiban hak asasi manusia internasional (Reksodiputro, 2017).

Di Swedia, advokasi kelompok ideologis yang berfokus pada hak asasi manusia memastikan bahwa hak asasi manusia tetap menjadi aspek utama kebijakan luar negeri, yang memengaruhi bantuan, perdagangan, dan keterlibatan diplomatik (Lindberg, 2010). Di Indonesia, kelompok ideologis dapat memengaruhi fokus pemerintah pada isu HAM tertentu berdasarkan upaya advokasi mereka (Reksodiputro, 2017). Misalnya, advokasi organisasi keagamaan dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terkait kebebasan beragama, sedangkan kelompok nasionalis dapat menekankan kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri dalam keputusan kebijakan luar negeri.

Sudut pandang yang lain adalah keterlibatan kedua negara tersebut dalam Forum Multilateral. Baik Swedia maupun Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam forum multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana isu-isu hak asasi manusia dibahas secara menonjol. Kelompok ideologis dari kedua negara terlibat dalam platform internasional ini untuk mempromosikan agenda hak asasi manusia masing-masing dan membentuk sikap kebijakan luar negeri negara tersebut terhadap tantangan hak asasi manusia global (Rughiniș, 2015).

Kelompok ideologi memainkan peran penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri Swedia dan Indonesia tentang hak asasi manusia. Sementara hak asasi manusia merupakan prioritas ideologis fundamental di Swedia, lanskap ideologis di Indonesia lebih beragam, mencakup berbagai pengaruh ideologis. Menyeimbangkan nilai-nilai ideologis dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan merekonsiliasi prioritas domestik dengan kewajiban internasional merupakan tantangan yang terus berlanjut. Memahami pengaruh kelompok ideologis memberikan wawasan tentang kompleksitas pertimbangan hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di kedua negara.

2. Analisis Komparatif

Pengaruh kelompok budaya, agama, dan ideologi pada keputusan kebijakan luar negeri merupakan aspek hubungan internasional yang kompleks dan beragam. Faktor budaya secara signifikan membentuk keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Di Swedia, budaya demokrasi sosial, egalitarianisme, dan hak asasi manusia sangat memengaruhi pendekatannya terhadap hubungan internasional. Komitmen Swedia terhadap hak asasi manusia tertanam kuat dalam budaya nasionalnya, yang mengarah pada prioritas hak asasi manusia yang konsisten dalam agenda kebijakan luar negerinya. Hak asasi manusia dianggap sebagai nilai fundamental yang memandu keterlibatan diplomatik, hubungan perdagangan, dan upaya bantuan internasional (Lindberg, 2010).

Di Indonesia, lanskap budaya yang beragam menghadirkan tantangan dan peluang unik untuk membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Budaya negara dicirikan oleh *permadani* yang kaya akan tradisi, bahasa, dan adat istiadat. Sementara Indonesia mengakui pentingnya hak asasi manusia, pertimbangan budaya lainnya, seperti nasionalisme dan identitas daerah (Jusuf,2011), terkadang dapat diutamakan dalam keputusan kebijakan luar negeri. Menyeimbangkan faktor budaya ini dengan pertimbangan

hak asasi manusia merupakan tantangan yang signifikan bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.

Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, dan organisasi Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam lanskap politik dan sosial negara ini. Kelompok Islam mengadvokasi kebijakan yang selaras dengan keyakinan agama mereka (Reksodiputro, 2017), yang dapat mempengaruhi sikap Indonesia terhadap hak asasi manusia baik dalam konteks domestik maupun internasional. Isu-isu seperti kebebasan beragama, perlindungan minoritas agama, dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan menjadi subyek advokasi oleh kelompok-kelompok agama (Reksodiputro, 2017). Sebaliknya, pengaruh agama terhadap keputusan kebijakan luar negeri di Swedia relatif terbatas. Negara ini memiliki tradisi sekuler, dan kelompok agama tidak memiliki tingkat keterlibatan atau pengaruh politik yang sama seperti di Indonesia (Rughiniș, 2015). Akibatnya, pertimbangan agama memainkan peran yang lebih kecil dalam membentuk kebijakan luar negeri Swedia, dengan mengutamakan hak asasi manusia, demokrasi, dan kemanusiaan (Rughiniș, 2015).

Kelompok ideologi yang mewakili ideologi politik tertentu juga berdampak pada keputusan kebijakan luar negeri baik di Swedia maupun Indonesia. Di Swedia, kelompok ideologi seperti demokrat sosial dan aktivis hak asasi manusia secara aktif mengadvokasi pendekatan berbasis hak dalam hubungan internasional (Lindberg, 2010). Kelompok-kelompok ini memengaruhi pembuat kebijakan dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia, demokrasi, dan kerja sama global dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri (Lindberg, 2010). Di Indonesia, lanskap ideologi lebih beragam, dengan berbagai kelompok yang mengusung nasionalisme, Islamisme, dan pluralisme. Kelompok nasionalis mengadvokasi untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan melindungi kepentingan nasional, seringkali mengambil pendekatan pragmatis untuk keputusan kebijakan luar negeri (Reksodiputro, 2017). Kaum Islamis berusaha menegakkan prinsip dan nilai Islam dalam hubungan internasional, terkadang menimbulkan ketegangan dengan standar hak asasi manusia universal (Kartikasari, 2019). Kelompok pluralis menekankan inklusivitas dan toleransi beragama, berkontribusi pada pendekatan diplomasi Indonesia dalam konteks keragaman agama (Reksodiputro, 2017).

Melalui analisis komparatif, beberapa pola kunci, kesamaan, dan perbedaan muncul dalam pengaruh kelompok budaya, agama, dan ideologi terhadap keputusan kebijakan luar negeri antara Swedia dan Indonesia:

a. Prioritas Hak Asasi Manusia: Swedia secara konsisten memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya, didorong oleh penekanan budayanya pada kesejahteraan sosial, egalitarianisme, dan hak asasi manusia. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertimbangan hak asasi manusia dengan faktor budaya dan ideologi lainnya, yang dapat menyebabkan berbagai tingkat prioritas dalam kebijakan luar negeri.
b. Pengaruh Keagamaan: Kelompok agama memainkan peran penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan prinsip-prinsip Islam. Di Swedia, pengaruh agama terhadap kebijakan luar negeri relatif terbatas karena tradisi sekulernya.
c. Fokus Ideologis: Kebijakan luar negeri Swedia sangat dipengaruhi oleh demokrasi sosial dan ideologi yang berfokus pada hak asasi manusia, yang membentuk pendekatannya terhadap isu-isu global. Kebijakan luar negeri Indonesia dibentuk oleh faktor ideologis yang lebih luas, termasuk nasionalisme, Islamisme, dan pluralisme, yang mengarah pada beragam pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Pengaruh kelompok budaya, agama, dan ideologi terhadap keputusan kebijakan luar negeri berimplikasi pada pertimbangan hak asasi manusia. Di Swedia, pengaruh kuat kelompok-kelompok yang berfokus pada hak asasi manusia memastikan bahwa hak asasi manusia tetap menjadi pusat pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, berkontribusi pada pendekatan berbasis hak dalam hubungan internasional. Di Indonesia, lanskap ideologis yang beragam menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan hak asasi manusia dengan faktor budaya dan ideologis lainnya, yang menyebabkan berbagai tingkat prioritas hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri.

Kesimpulan dan Saran

Studi komparatif ini menyoroti hubungan yang kompleks antara budaya nasional, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri di Swedia dan Indonesia. Analisis pengaruh kelompok budaya, agama, dan ideologis terhadap keputusan kebijakan luar negeri terkait hak asasi manusia memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara ini menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia dalam hubungan internasional mereka.

Keselarasan budaya nasional Swedia yang kuat dengan nilai-nilai hak asasi manusia telah menyebabkan prioritas hak asasi manusia yang konsisten dalam kebijakan luar negerinya (Lindberg, 2010). Pengaruh kelompok budaya dan ideologis yang berfokus pada hak asasi manusia memastikan bahwa hak asasi manusia tetap menjadi pusat keterlibatan diplomatik Swedia dan kerja sama internasional. Namun, pengaruh kelompok agama yang terbatas karena tradisi sekuler Swedia memungkinkan pendekatan yang lebih fokus dan berbasis hak untuk keputusan kebijakan luar negeri tentang hak asasi manusia.

Di sisi lain, lanskap budaya, agama, dan ideologi Indonesia yang beragam menghadirkan tantangan dalam mengintegrasikan sepenuhnya pertimbangan hak asasi manusia ke dalam keputusan kebijakan luar negeri. Sementara negara mengakui pentingnya hak asasi manusia, pengaruh berbagai kelompok, termasuk organisasi keagamaan, nasionalis, dan pluralis, berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih beragam. Akibatnya, Indonesia menghadapi kerumitan dalam menyeimbangkan hak asasi manusia dengan faktor budaya dan ideologis lainnya, yang mengarah ke berbagai tingkatan prioritas hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya.

Rekomendasi kebijakan diajukan untuk meningkatkan integrasi masalah hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di kedua negara;

1. Perkuat Pendidikan dan Kesadaran Hak Asasi Manusia: Baik di Swedia maupun Indonesia, pembuat kebijakan harus memprioritaskan pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia di kalangan pejabat pemerintah, diplomat, dan ahli kebijakan luar negeri. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan implikasinya terhadap hubungan internasional, para pembuat keputusan dapat lebih mengadvokasi dan mengintegrasikan masalah hak asasi manusia dalam diskusi dan negosiasi kebijakan luar negeri.
2. Mempromosikan Keterlibatan Banyak Pemangku Kepentingan: Untuk memastikan pendekatan komprehensif terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri,

kedua negara harus mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, pakar hak asasi manusia, dan perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak. Para pemangku kepentingan ini dapat memberikan wawasan yang berharga, mengangkat masalah hak asasi manusia, dan menawarkan perspektif alternatif kepada pembuat kebijakan, sehingga memperkaya proses pengambilan keputusan.

3. Perkuat Dialog Hak Asasi Manusia: Swedia dan Indonesia harus secara aktif terlibat dalam dialog hak asasi manusia dengan negara lain dan organisasi internasional. Dialog ini memberikan kesempatan untuk berbagi praktik terbaik, bertukar ide, dan berkolaborasi dalam mempromosikan hak asasi manusia secara global. Dengan berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif, kedua negara dapat meningkatkan kredibilitas dan pengaruhnya terhadap isu-isu HAM di arena internasional.
4. Perkuat Diplomasi Hak Asasi Manusia: Penekanan kuat Swedia pada hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri dapat menjadi model bagi Indonesia. Indonesia harus meningkatkan upaya diplomasi HAM, aktif terlibat dalam forum internasional, dan mengadvokasi isu HAM secara konsisten dan berprinsip. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam mempromosikan hak asasi manusia secara global.

Pada akhirnya, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menghormati keragaman budaya dan memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional. Dengan menavigasi kompleksitas ini, kedua negara dapat secara efektif mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sambil mengejar kepentingan nasional mereka dalam konteks global.

Kesimpulannya, studi komparatif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran budaya nasional, hak asasi manusia, dan faktor ideologis dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Ini berfungsi sebagai sumber berharga bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan advokat yang ingin meningkatkan integrasi pertimbangan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri dan memperkuat perlindungan dan promosi hak asasi manusia di seluruh dunia. Melalui upaya berkelanjutan untuk mengatasi kompleksitas, Swedia dan Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih kuat dan berprinsip dalam kebijakan luar negeri, memastikan bahwa hak asasi manusia tetap berada di garis depan dalam keterlibatan internasional mereka.

Referensi

Alagappa, M. (2001). *The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas*. Duke University Press.

Lindberg, S. (2010). *Human Rights as a Foreign Policy Objective: A Study of Swedish Human Rights Policy*. Lund University.

Kartikasari, N. (2019). *Indonesian Foreign Policy under Joko Widodo: Continuity and Change*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Pettersson, T. (2010). *Human Rights and Foreign Policy in the EU: A Comparative Study of Sweden and the United Kingdom*. Lund University.

Nasr, V. R. (2005). *The Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. Oxford University Press.

Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

Paus, E. (2017). *Culture and Foreign Policy: A New Theory and Some Cases*. Routledge.

Rahmawati; Indrawati. (2022). *Peran Diplomasi Kebudayaan Jepang dalam Perkembangan Perekonomian Jepang Melalui JAK Japan Matsuri di Indonesia Tahun 2017-2019.* Global Insight Journal Vol.7 No. 2

"National Culture and Foreign Policy: A Study of Cultural Influences on Swedish Foreign Policy Making" by Mikael Eriksson (2005).

"Indonesian Foreign Policy: The Dynamics of Change" edited by Mohammad Taqi and Denny Indrayana (2016).

"Human Rights in Indonesia: Violations and the State's Response" by Andreas Harsono and Usman Hamid (2012).

"The Role of Culture in Shaping Foreign Policy" edited by Vally Koubi (2007)

"Culture Matters: How Values Shape Human Progress" by Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington (2000)

Jonsson, A. (2017). Cultural Factors and Foreign Policy: Exploring the Linkages. Routledge.

Rughiniș, C. (2015). Culture and foreign policy: A comparative analysis of Sweden and Indonesia. Diplomacy & Statecraft, 26(2), 221-237.

Fredrik, J. (2014). Cultural differences and national identity in Swedish foreign policy: implications for a changing world. Journal of International Relations and Development, 17(3), 401-418.

Jusuf, H. (2011). Indonesia and the West: Culture, religion and the foreign policy of an emerging power. Routledge.

Reksodiputro, G. (2017). The role of cultural and religious factors in Indonesian foreign policy towards the West. In International Relations of Southeast Asia (pp. 101-122). Routledge.

Bussmann, K., & van Laer, J. (2017). Cultural Variables and Foreign Policy: A Study of Sweden and the Netherlands. Diplomacy & Statecraft, 28(3), 483-500.

"Religious Diversity and Human Rights in Indonesia" Andreas H. HRDY

"The Politics of Religious Freedom in Indonesia" Ross Tapsell

"Indonesian Political Culture: Democracy and Islam" Mark Woodward

"Indonesia's Experiment with Democracy: Challenges and Prospects" Patrick Ziegenhain

"Human Rights and Political Development in Indonesia" Anthony Reid

"The Dynamics of Islamic Civilization in Indonesia" D. S. Nadjar

"Religious Tolerance in Indonesia:The Role of Government, Civil Society, and the Media" R. William Liddle

"The Future of Human Rights in Indonesia" Robin Ramcharan

"Indonesia's Journey towards Democracy: The Role of Civil Society" Marcus Mietzner

"Indonesian Islam in a New Era: How Women are Changing the Faith" Elaine Pearson

"Indonesian Politics under Susilo Bambang Yudhoyono: The Rise of a pragmatic Statesman" Arndt Graf